

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PDRB
(STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2009-
2014)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PRIA PANDU YUSTISIA

NIM : 12020112130048

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Pria Pandu Yustisia
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130048
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PDRB (STUDI KASUS
KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
TAHUN 2009-2014)**
Dosen Pembimbing : Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

Semarang, 25 November 2016

Dosen Pembimbing

(Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.)

NIP. 19551208 198003 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Pria Pandu Yustisia

Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130048

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PDRB (STUDI KASUS
KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
TAHUN 2009-2014)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Desember 2016

Tim Penguji:

1. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc. (.....)
2. Drs. H Edy Yusuf A G, MSc. Ph. D (.....)
3. Dr. Hadi Sasana ,SE., M.Si (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Pria Pandu Yustisia, menyatakan bahwa skripsi dengan Judul: Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2009-2014), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 November 2016

Yang membuat pernyataan,

(Pria Pandu Yustisia)

NIM: 12020112130048

ABSTRACT

The change of centralization system becomes decentralization began with the enactment of law No. 22 of 1999 about local governance and law No. 25 of 1999 regarding financial equalization between the Center and regions. With the Act based on the Indonesia adhere to the system of fiscal decentralization and regional autonomy in the system portion of the policy that previously centralised handed over to autonomy regions, meaning that any policy related to the interests of the autonomy region can be taken directly by local governments including fiscal policy known as fiscal decentralization. Decentralized fiscal systems in the region are expected to meet their financial needs in accordance with its own conditions of each area in order to support the acceleration of sustainable regional development. This research aims to analyze the influence of fiscal decentralization towards regional GDP. Fiscal decentralization in this analysis is measured using revenue indicator, expenditures indicator and autonomy indicator. In addition to seeing the influence of fiscal decentralization in conjunction with other regional output or regional GDP factor, then in this study using variable that theoretically have significant influence towards regional GDP, namely: investments and the amount of labor.

In this study used the method of Ordinary Least Square (OLS) and using a Dummy Variable with an estimation model Fixed Effect Model (FEM). While the data used is the data panel level district/city in Central Java province that covers a period of 5 years (2009-2014). The results of the analysis showed that the implementation of fiscal decentralization gives a relatively good impact toward regional GDP in Central Java province. In addition variable investment and the amount of labor was entirely positive effect against economic growth areas in Central Java province.

Key Words : Regional GDP, fiscal decentralization, economic growth, investments, labor

ABSTRAKSI

Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan berlandaskan undang-undang tersebut Indonesia menganut sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimana dalam sistem tersebut sebagian kebijakan yang sebelumnya terpusat diserahkan kepada daerah otonom, artinya segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah otonom dapat diambil langsung oleh pemerintah daerah masing-masing termasuk kebijakan mengenai fiskal yang dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Dalam sistem desentralisasi fiskal daerah diharapkan mampu memenuhi sendiri kebutuhan keuangannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PDRB. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis ini meliputi Indikator Penerimaan, Indikator Pengeluaran dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor yang diduga mempengaruhi PDRB lainnya, maka dalam penelitian ini menggunakan variabel yang secara teoritis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output daerah atau PDRB, yaitu: Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja.

Dalam penelitian ini digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan menggunakan *Dummy Variable* dengan model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM). Sementara itu data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencakup periode 6 tahun (2009-2014). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang baik terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu variabel Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja seluruhnya berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: PDRB, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2009-2014)*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan. Namun, berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Akhmad Syakir Kurnia SE, M.Si, Ph.D. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memotivasi, memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Arif Pujiyono, SE, M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta yang selalu memberikan semua dukungan moril maupun materiil serta memberikan curahan kasih sayang, do'a-do'a, dan motivasi yang tidak ternilai bagi penulis.
7. Kakak penulis, Fatma Santiawati yang telah menemani penulis berproses dalam kehidupan dari kecil sampai sekarang dan selalu memberikan motivasi, pengetahuan, dan memberikan pengalaman yang baik kepada penulis.
8. Ricko Fernando, Samuel Muliawan, Dio Kris, Agha Syaifullah, Fadhilah Eka, M. Fakhruddin, Anggoro Abdurahman, Joseph Jati, Yuke Firdausi, Prissa Deffinika, Ratu Ahdini, Ivana, Hani Permatasari, Annisa Eka yang setiap saat selalu mengisi waktu luang dengan hiburan canda tawa dan berbagi kisah.
9. Dindin, Luthfi, Lazuardi, Bimo, Fahmi, Adhi, Arif, Ari teman satu perantauan dan teman bermain yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HMJ IESP) periode 2012-2013, Fajar Setiawan, Hendrik Widyanto, Cantika, David, Yunita, Yossi, Bernadhete, Andre, Intan Respatining, Silfia Nurul, Citra Sekarwangi, Clara Palupi, M.Dzakir Fiqi, Giva Pradipta, Ilham Rusdiansyah, Joseph Alfredo, Maylasari, Zaka Nurfahrudin.
11. Teman-teman konsentrasi publik, dan seluruh teman-teman IESP angkatan 2012. Terima kasih pengalamannya.

12. TIM KKN I periode 2016 desa Banyumanis, Jepara. Farras, Gilang, Badrul, Mas Adhi, Izan, Effendi, Alvin, Amel, Pingkan, Nandia, Utya, Mona, Nia, Mila, Sasa atas kebersamaanya dan selalu kompak, sukses selalu kawan.
13. Semua pihak yang telah membantu dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 25 November 2016

Penulis,

Pria Pandu Yustisia

NIM. 12020112130048

Daftar Isi

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
.ABSTRACT.....	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	16
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	18
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi	18
2.2 Desentralisasi Fiskal	21
2.3 Indikator Desentralisasi Fiskal	24
2.3.1 Indikator Penerimaan	24
2.3.2 Indikator Pengeluaran Daerah	32
2.3.3 Indikator Otonomi	34
2.4 Pertumbuhan Ekonomi	34
2.4.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi	34
2.4.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Dommar	36
2.4.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow	37
2.5 Teori Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah.....	39
2.5.1 Teori Peacock dan Wiseman	39
2.5.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave	39

2.5.3	Hukum Wagner	40
2.6	Variabel-variabel lain yang mempengaruhi PDRB	42
2.6.1	Investasi	42
2.6.2	Tenaga Kerja	43
2.7	Desentralisasi Fiskal dan PDRB	44
2.8	Penelitian Terdahulu	45
2.9	Kerangka Pemikiran	52
2.10	Hipotesis Penelitian	55
	BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	56
3.1.1	Variabel Penelitian	56
3.1.2	Definisi Operasional	56
3.2	Jenis dan Sumber Data	59
3.3	Metode Pengumpulan Data	61
3.4	Metode Analisis	61
3.4.1	Uji Metode Estimasi Model Regresi (<i>Hausman test</i>)	62
3.4.2	Estimasi Model dengan Panel Data	63
3.4.3	Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) atau <i>Least Square Dummy Variable</i> (LSDV)	64
3.4.4	Pengujian Statistik	66
3.4.4.1	Uji Signifikasni Individu (Uji t)	66
3.4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	67
3.4.4.3	Koefisien Determinan (R^2)	68
3.4.5	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	69
3.4.6	<i>Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent</i> (HAC)	71
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	72
4.1.1	Gambaran Umum	72
4.1.2	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	74
4.1.3	Kondisi Desentralisasi Fiskal Jawa Tengah	76
4.1.4	Kondisi Investasi Jawa Tengah	82
4.1.5	Kondisi Tenaga Kerja Jawa Tengah	85

4.2	Hasil Uji Metode Model Regresi	87
4.3	Hasil Regresi Menggunakan Model LSDV	88
4.4	Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	89
4.4.1	Deteksi Normalitas	89
4.4.2	Deteksi Multikolinearitas	90
4.4.3	Deteksi Heterokedastisitas.....	91
4.4.4	Deteksi Autokorelasi	92
4.5	Hasil Uji Statistik Analisis Regresi	93
4.5.1	Koefisien determinasi (R^2)	93
4.5.2	Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)	94
4.5.3	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	95
4.6	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	98
4.6.1	Indikator Penerimaan	98
4.6.2	Indikator Pengeluaran.....	99
4.6.3	Indikator Otonomi/Kemandirian Daerah.....	101
4.6.4	Pengaruh Variabel Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.....	103
4.6.4.1	Investasi	103
4.6.4.2	Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PDRB	105
4.6.4.3	Analisis Variabel Dummy Wilayah.....	106
	BAB V PENUTUP	108
5.1	Simpulan.....	108
5.2	Keterbatasan Penelitian	110
5.3	Saran	110
	DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014.....	4
Tabel 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi di Pulau Jawa 2009 - 2014 (%).....	5
Tabel 1.3	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014.....	6
Tabel 1.4	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah 2009-2014.....	7
Tabel 1.5	Realisasi dan Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2014	13
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 4.1	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010- 2014.....	74
Tabel 4.2	Pekembangan Kontribusi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 (%).....	78
Tabel 4.3	Pekembangan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 (%)	80
Tabel 4.4	Pekembangan Rasio Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 (%).....	83

Tabel 4.5 Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah Tahun 2009-2014 (Miliar rupiah).....	84
Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 (jiwa).....	85
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman.....	87
Tabel 4.8 Hasil Regresi Penelitian (Dependent Variabel PDRB) Menggunakan FEM LSDV.....	88
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	89
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	90
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas (White test)	91
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi	92
Tabel 4.13 Signifikansi Individu T-statistik.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Untuk Seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2014.....	9
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2014.....	10
Gambar 1.3	Penduduk yang Bekerja dan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014.....	11
Gambar 2.1	Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	20
Gambar 2.2	Kerangka Hubungan Pusat-Daerah.....	23
Gambar 2.3	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.....	42
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 4.1	Peta Provinsi Jawa Tengah.....	73
Gambar 4.2	Rata-rata PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	116
LAMPIRAN B	121
LAMPIRAN C	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang sangat besar dan merupakan salah satu negara kepulauan memiliki banyak wilayah dengan perbedaan karakteristik. Karakteristik yang berbeda pada setiap daerah berdampak pada adanya pola pembangunan ekonomi yang berbeda pada setiap wilayah dan daerah di Indonesia. Daerah yang memiliki sumber penerimaan yang banyak dan letak geografisnya cenderung ke pusat, pembangunan ekonominya relatif lebih baik. Terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi pada setiap daerah merupakan salah satu buah dari kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik yang dilaksanakan oleh pemerintah pada masa orde baru.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang selanjutnya di amandemen dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dimana merupakan awal tahap terjadinya peralihan dari mekanisme pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi di berbagai bidang bernegara di Indonesia. Pelaksanaan mekanisme pemerintahan desentralisasi sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001 di Indonesia. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Keputusan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan dan membiayai sendiri segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, dimana desentralisasi fiskal adalah salah satu mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat dalam hal ini APBN sebagai perwujudan ketahanan fiskal berkelanjutan (*fiscal sustainability*) (Hariadi, 2010). Adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sesuai dengan adanya pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat mengenai urusan pemerintah daerah otonom.

Pada prinsipnya pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah tidak hanya sekedar menjalankan delegasi fiskal sisi pengeluaran semata akan tetapi kewenangan fiskal untuk memenuhi tuntutan kemandirian fiskal dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Adi, 2005).

PDRB merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. PDRB digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya peningkatan PDRB menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Data yang disajikan pada Tabel 1.1 menunjukkan jumlah PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama enam tahun memiliki kecenderungan selalu meningkat. Pada tahun 2009 Kota Magelang memiliki nilai PDRB terendah yakni sebesar 1,045 Triliun rupiah dan tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 20,181 Triliun, sementara pada tahun 2014 PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Semarang sebesar 102,01 Triliun dan Kota Magelang memperoleh PDRB terkecil yakni sebesar 4,897 Triliun.

Tabel 1.1
Data PDRB kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014 (Miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	PDRB					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	12.303	12.998	13.749	14.518	15.352	83.776
2	Kab. Banyumas	4.401	4.655	4.931	5.222	5.572	29.098
3	Kab. Purbalingga	2.390	2.526	2.678	2.846	3.007	13.554
4	Kab. Banjarnegara	2.754	2.889	3.031	3.190	3.357	11.583
5	Kab. Kebumen	2.828	2.946	3.070	3.242	3.378	15.176
6	Kab. Purworejo	2.873	3.017	3.168	3.328	3.494	10.345
7	Kab. Wonosobo	1.811	1.889	1.974	2.076	2.179	10.893
8	Kab. Magelang	3.939	4.116	4.292	4.543	4.797	17.916
9	Kab. Boyolali	4.101	4.248	4.472	4.726	4.982	17.086
10	Kab. Klaten	4.761	4.843	4.938	5.212	5.513	21.392
11	Kab. Sukoharjo	4.757	4.978	5.207	5.469	5.743	20.424
12	Kab. Wonogiri	2.902	3.072	3.141	3.325	3.470	16.110
13	Kab. Karanganyar	5.172	5.452	5.752	6.087	6.415	20.209
14	Kab. Sragen	2.893	3.070	3.270	3.486	3.717	20.171
15	Kab. Grobogan	3.097	3.253	3.370	3.578	3.742	15.054
16	Kab. Blora	2.011	2.115	2.170	2.279	2.391	12.227
17	Kab. Rembang	2.187	2.284	2.384	2.501	2.626	10.282
18	Kab. Pati	4.357	4.580	4.829	5.115	5.407	23.327
19	Kab. Kudus	12.145	12.652	13.184	13.755	14.399	62.603
20	Kab. Jepara	4.085	4.270	4.503	4.763	5.038	16.327
21	Kab. Demak	2.901	3.021	3.156	3.303	3.455	14.076
22	Kab. Semarang	5.301	5.561	5.870	6.223	6.573	27.535
23	Kab. Temanggung	2.310	2.409	2.521	2.648	2.781	11.988
24	Kab. Kendal	5.090	5.394	5.717	6.034	6.350	23.463
25	Kab. Batang	2.251	2.362	2.487	2.612	2.746	11.690
26	Kab. Pekalongan	3.098	3.230	3.384	3.565	3.759	12.627
27	Kab. Pemalang	3.293	3.456	3.623	3.814	4.020	13.894
28	Kab. Tegal	3.460	3.627	3.802	4.001	4.234	18.956
29	Kab. Brebes	5.248	5.507	5.781	6.082	6.390	25.092
30	Kota Magelang	1.045	1.109	1.169	1.245	1.319	4.987
31	Kota Surakarta	4.818	5.104	5.412	5.743	6.081	26.955
32	Kota Salatiga	869	913	961	1.018	1.081	7.323
33	Kota Semarang	20.181	21.366	22.736	24.196	25.697	102.501
34	Kota Pekalongan	1.978	2.087	2.201	2.324	2.461	5.755
35	Kota Tegal	1.225	1.282	1.340	1.408	1.478	8.473

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah dalam Angka 2014

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah 2009-2014 (%)

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi						Rata-rata
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Cilacap	5,25	5,65	5,78	5,59	5,75	5,96	5,66
2	Kab. Banyumas	5,49	5,77	5,95	5,88	6,71	4,78	5,76
3	Kab. Purbalingga	5,89	5,67	6,03	6,26	5,66	5,73	5,87
4	Kab. Banjarnegara	5,11	4,89	4,92	5,25	5,25	5,07	5,08
5	Kab. Kebumen	3,94	4,15	4,23	5,59	4,2	5,8	4,65
6	Kab. Purworejo	4,96	5,01	5,02	5,04	4,99	4,63	4,94
7	Kab. Wonosobo	4,02	4,29	4,52	5,14	4,98	4,16	4,52
8	Kab. Magelang	4,72	4,51	4,27	5,84	5,6	4,87	4,97
9	Kab. Boyolali	5,16	3,6	5,28	5,66	5,43	5,04	5,03
10	Kab. Klaten	4,24	1,73	1,96	5,54	5,79	5,38	4,11
11	Kab. Sukoharjo	4,76	4,65	4,59	5,03	5,01	5,26	4,88
12	Kab. Wonogiri	4,73	5,87	2,24	5,87	4,36	5,26	4,72
13	Kab. Karanganyar	5,54	5,42	5,5	5,82	5,38	5,12	5,46
14	Kab. Sragen	6,01	6,09	6,53	6,6	6,64	5,59	6,24
15	Kab. Grobogan	5,03	5,05	3,59	6,16	4,59	4,03	4,74
16	Kab. Blora	5,08	5,19	2,59	5	4,91	4,39	4,53
17	Kab. Rembang	4,46	4,45	4,4	4,88	5,03	5,15	4,73
18	Kab. Pati	4,69	5,11	5,43	5,92	5,72	4,54	5,24
19	Kab. Kudus	3,95	4,17	4,21	4,33	4,68	4,26	4,27
20	Kab. Jepara	5,02	4,52	5,44	5,79	5,77	4,64	5,20
21	Kab. Demak	4,08	4,12	4,48	4,64	4,62	4,27	4,37
22	Kab. Semarang	4,37	4,9	5,56	6,02	5,62	6	5,41
23	Kab. Temanggung	4,09	4,31	4,65	5,04	5,02	5,15	4,71
24	Kab. Kendal	5,55	5,97	5,99	5,54	5,24	5,1	5,57
25	Kab. Batang	3,72	4,97	5,26	5,02	5,17	5,31	4,91
26	Kab. Pekalongan	4,3	4,27	4,77	5,32	5,45	4,92	4,84
27	Kab. Pemalang	4,78	4,94	4,83	5,28	5,41	5,52	5,13
28	Kab. Tegal	5,29	4,83	4,81	5,25	5,81	5	5,17
29	Kab. Brebes	4,99	4,94	4,97	5,21	5,06	5,32	5,08
30	Kota Magelang	5,11	6,12	5,48	6,48	5,91	4,88	5,66
31	Kota Surakarta	5,9	5,94	6,04	6,12	5,89	5,24	5,86
32	Kota Salatiga	4,48	5,01	5,26	5,94	6,14	4,8	5,27
33	Kota Semarang	5,34	5,87	6,41	6,42	6,2	5,3	5,92
34	Kota Pekalongan	4,78	5,51	5,45	5,6	5,89	5,48	5,45
35	Kota Tegal	5,02	4,61	4,58	5,07	4,93	5,03	4,87
Pertumbuhan Ekonomi Nasional		5	6,6	6,98	6,85	6,2	5,02	6,1

Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2, selama periode 2009-2014 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar (5,1%). Pertumbuhan tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar (6,1%). Pada periode 2009-2014 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki *gap* yang tidak terlalu jauh satu dengan lainnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa setiap daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber modal mereka, sehingga dalam jangka panjang daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi untuk bersaing dengan Provinsi lainnya.

Pada dasarnya setiap daerah tidak memiliki kemampuan yang sama satu dengan yang lain dalam melaksanakan fungsi otonominya. Di satu sisi ada daerah yang tergolong sebagai daerah yang memiliki banyak sumber penerimaan yang potensial, baik yang berasal dari bagi hasil pajak maupun bukan pajak. Namun, disisi lain ada daerah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi otonomi dan keuangan yang terbatas dikarenakan minimnya sumber penerimaan potensial bagi pemerintah. Pada Tabel 1.4 ditampilkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang bisa menjadi gambaran sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali pendapatan potensial di daerahnya masing-masing.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota
di Provinsi Jawa Tengah 2009-2014 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	PAD					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Cilacap	120,7	126,8	172,3	196,6	278,8	23,01
2	Kab. Banyumas	120,5	65,3	191,8	242,1	308,3	31,77
3	Kab. Purbalingga	83,1	68,1	94,9	112,7	122,8	16,21
4	Kab. Banjarnegara	60,6	60	71,1	94,2	98,9	10,35
5	Kab. Kebumen	63	67,9	73,5	102,3	131,4	126,85
6	Kab. Purworejo	60,8	60,9	88,9	98,2	127,5	13,50
7	Kab. Wonosobo	46,3	60,6	67,3	82,3	108,7	10,76
8	Kab. Magelang	75,5	78,6	90,4	123,7	173,2	13,45
9	Kab. Boyolali	73,9	80	96,7	127,7	160,7	18,14
10	Kab. Klaten	53,1	71,3	72,2	84,7	115,4	10,03
11	Kab. Sukoharjo	48,8	60,3	96,1	164,9	192,9	17,91
12	Kab. Wonogiri	49,9	64,8	77,1	101,4	111,5	14,01
13	Kab. Karanganyar	66,9	73,9	104,0	116,7	161,7	14,30
14	Kab. Sragen	72,6	69,3	94	127,6	146,7	13,79
15	Kab. Grobogan	77	56,1	87	105,4	143,5	17,21
16	Kab. Blora	49,6	56,5	67	81,9	94,9	11,97
17	Kab. Rembang	56,8	78,2	73,9	102,7	126,8	13,99
18	Kab. Pati	90,6	92,1	134,4	163,7	169,1	17,32
19	Kab. Kudus	83	92,2	108,4	121,0	144,9	16,83
20	Kab. Jepara	71,9	7,1	103,6	129,0	133,7	18,20
21	Kab. Demak	49,8	54,5	74,5	105,3	138,2	15,86
22	Kab. Semarang	90,3	97,1	133,1	156,1	215,6	21,18
23	Kab. Temanggung	47,3	55	63,3	78,5	102,0	98,9
24	Kab. Kendal	76,8	75,7	93,2	120,1	136,0	15,55
25	Kab. Batang	44,6	44,5	60,1	84,7	143,5	10,89
26	Kab. Pekalongan	58,4	55,9	81,3	114,7	148,4	15,37
27	Kab. Pemalang	81,8	61,4	79,6	97,9	136,3	11,71
28	Kab. Tegal	70,5	74,3	90,1	118,7	156,2	18,04
29	Kab. Brebes	80,2	70,4	78,2	101,8	135,0	15,34
30	Kota Magelang	47,7	50	63,5	90,9	107,7	98,3
31	Kota Surakarta	101,9	120,1	181,0	231,6	298,4	297,0
32	Kota Salatiga	52	51,5	60,6	77,7	106,1	92,1
33	Kota Semarang	306,1	293,8	521,5	780,9	925,9	819,7
34	Kota Pekalongan	32,2	381,8	63,3	91,2	114,2	104,2
35	Kota Tegal	90,8	79,1	117,2	156,7	176,3	166,1
Rata-rata		75,9	76,4	106,5	139,6	174	173,4

Sumber : Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah

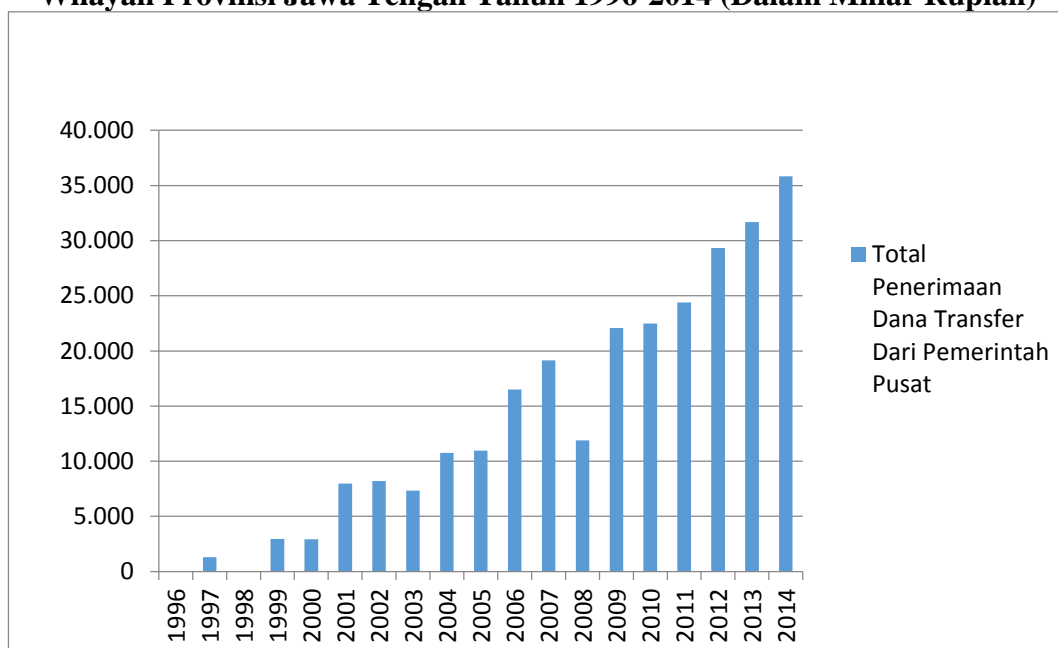
Kuncoro (2004) menyatakan bahwa meskipun sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern, tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia pemanfaatan sumber daya alam dapat menjadi penopang yang cukup dapat di andalkan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien dan efektif .

Dengan demikian setiap daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memilih sektor ekonomi unggulan berdasarkan potensi sumber daya daerah masing.

Dari sisi penerimaan daerah, sebagai perwujudan asas desentralisasi pemerintah daerah dapat melakukan pemanfaatan potensi daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah. Selain itu PAD dapat dikatakan sebagai ukuran utama atas suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Berdasarkan Tabel 1.4 secara nominal perkembangan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2009–2014 terus mengalami peningkatan. Dari semula rata-rata PAD kabupaten dan kota Rp 75,9 triliun pada tahun 2009, berangsur-angsur meningkat menjadi 76,4 triliun pada tahun 2010.

Gambar 1.1
Perkembangan Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Untuk Seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2014 (Dalam Miliar Rupiah)



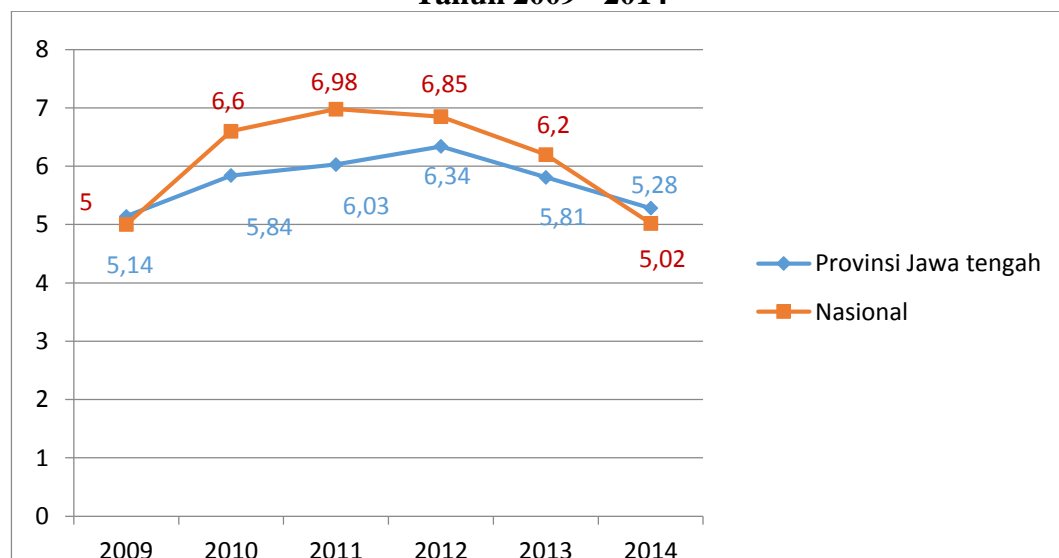
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat selama tahun 1996 (sebelum desentralisasi fiskal) hingga 2014 (setelah desentralisasi fiskal) berfluktuasi namun cenderung memiliki *trend* yang selalu naik. Dana perimbangan yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah meningkat sangat drastis dari Rp 889 Miliar pada tahun 1996 menjadi Rp 33,844 triliun pada tahun 2014.

Dengan peningkatan dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kecuali untuk tahun 2009 dan 2014, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Selama tahun 2009 hingga 2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2013 dan 2014.

Gambar 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2009 - 2014



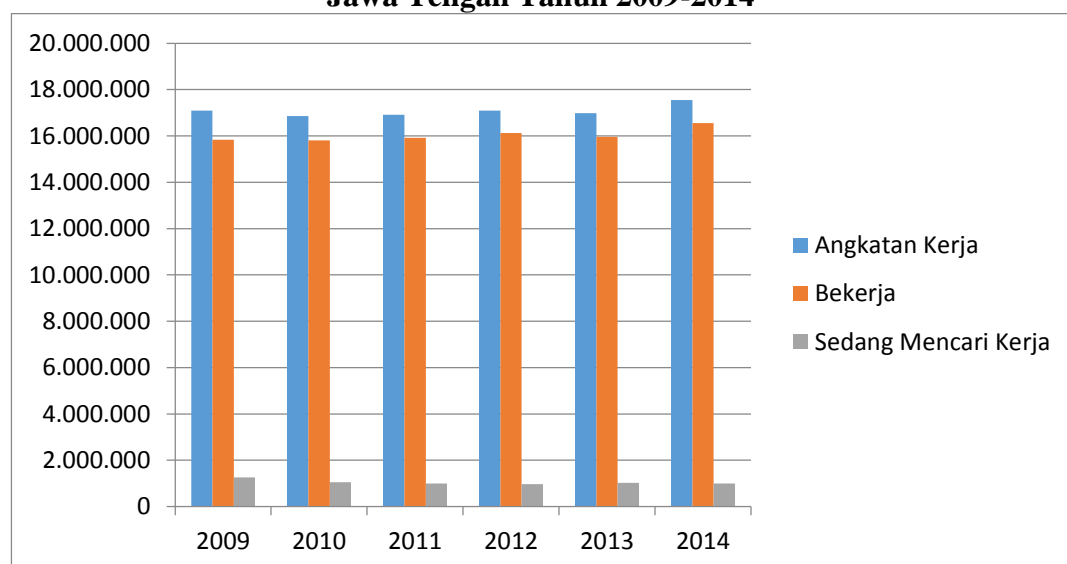
Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu bisa

menjadi salah satu faktor pendorong atau penghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jumlah penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh tumbuhnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Hasil penelitian Mubaroq, Remi dan Muljarijadi (2013) terdapat pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sesuai dengan teori pertumbuhan Solow yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.3
Penduduk yang Bekerja dan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2014



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2014-2015 (BPS)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja tahun 2009-2014 berfluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah orang yang bekerja di tahun 2010, dari 15,84 juta jiwa di tahun 2009 menjadi 15,81 juta jiwa di

tahun 2010, setelah itu terjadi peningkatan di tahun 2012 dari 15,81 juta pada tahun 2010 menjadi 16,13 juta jiwa lalu kembali turun di tahun 2013 menjadi 15,96 juta jiwa dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 16,5 juta jiwa. Sementara itu, jumlah orang yang sedang mencari kerja mengalami penurunan dari tahun 2009-2014. Di tahun 2009, jumlah orang yang sedang mencari kerja sebesar 1,25 juta jiwa terus mengalami penurunan sampai tahun 2014 sebesar 996 ribu jiwa. Hal ini memberikan indikasi bahwa Provinsi Jawa Tengah telah berhasil memberikan ketersediaan lapangan kerja baru setiap tahunnya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja baru.

Investasi merupakan variabel penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa suatu perekonomian memerlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro dan Smith, 2011). Investasi terdiri dari investasi asing dan domestik. Investasi khususnya yang terdapat di daerah dapat berupa investasi pemerintah dan investasi Swasta. Investasi pemerintah dilakukan untuk menyediakan barang publik sedangkan Investasi Swasta merupakan investor yang berasal dari luar negeri (PMA) maupun investor dari dalam negeri (PMDN).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari peran investasi yang telah ditanamkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 1.5, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009-2014 berfluktuasi. Realisasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun 2009 sebesar Rp.

2,6 triliun menjadi Rp. 2,7 triliun pada tahun 2011, lalu pada tahun 2012 hingga 2014 realisasi investasi PMDN terus mengalami kenaikan menjadi Rp. 5,7 triliun pada tahun 2012 dan Rp. 13,6 triliun pada tahun 2014. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2009-2014 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, realisasi PMA sebesar \$ 83,10 juta mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar \$ 59,10 juta dan kembali naik hingga tahun 2014 sebesar \$ 463 juta.

Tabel 1.5
Realisasi dan Persentase Laju Pertumbuhan Investasi
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2014

Tahun	PMDN		PMA	
	Investasi (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)	Investasi (Juta US \$)	Pertumbuhan
2009	2.642,60	98%	83,10	-39%
2010	795,40	-70%	59,10	-29%
2011	2.737,8	244%	175,00	196%
2012	5.797,10	112%	241,50	38%
2013	12.593,60	117%	464,30	92%
2014	13.601,60	8%	463,40	-0,19%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari peranan kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu selama era desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan daerah sebanyak-banyaknya yang

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi serta faktor lainnya yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel tenaga kerja dan investasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dilaksanakannya desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemberian dan pengalihan otoritas dalam pengelolaan sektor fiskal dari pemerintah pusat ke daerah. Dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan data pada latar belakang diatas melalui pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan terjadi peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukan desentralisasi fiskal. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2009-2014 memiliki *trend* yang positif. Namun, peningkatan sumber-sumber penerimaan dan kewenangan dalam membelanjakan kabupaten dan kota tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009 hingga 2014. Dengan sumber-sumber penerimaan ini seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Terkait hal tersebut maka muncul pertanyaan penelitian

“apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara signifikan mempengaruhi PDRB di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2009-2014?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk :

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal indikator penerimaan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah;
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal indikator pengeluaran terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah;
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal indikator otonomi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah;
4. Menganalisis dan mengetahui pengaruh investasi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.
5. Menganalisis dan mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.
6. Menganalisis dan mengetahui karakteristik PDRB masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori-teori aplikasi ekonomi publik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan mengenai pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa tengah, jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah, kondisi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah, Investasi dan Tenaga Kerja di masing-masing wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pada bagian rumusan masalah. Selain itu, terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab II akan dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori dasar pertumbuhan ekonomi, yang meliputi teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar,

teori pertumbuhan ekonomi Solow dan teori pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang terdiri dari teori teori Peacock dan Wiseman, teori pengeluaran pemerintah Rostow dan Musgrave serta Hukum Wagner. Dalam bab ini juga dibahas penjelasan umum mengenai variabel-variabel yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai definisi operasional variabel-variabel penelitian, penjelasan mengenai jenis dan sumber data, dan metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian yang akan dianalisis. Selain itu, bab ini menjelaskan hasil analisis data panel yang mencakup 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, hasil perhitungan data dengan alat analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*), dan inteprestasi hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, rekomendasi kebijakan, dan saran setelah dilakukan penelitian. Bab ini juga berisikan keterbatasan penelitian dan saran baik untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pengambil kebijakan.yang diperuntukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.